

ANALISIS KEBIJAKAN INVESTASI PADA SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN REGIONAL JAWA TENGAH DENGAN METODE LOCATE QUOTIENT, ICOR, DAN TREND LINEAR

Nur Khasanah
STIE Putra Bangsa
Arya Samudra Mahardika
STIE Putra Bangsa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kebijakan integrasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam hal investasi di Indonesia dengan mengambil sampel sektor basis dan non basis di Jawa Tengah. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan Metode Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis, dan metode alternatif Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk menentukan kebutuhan investasi sektor-sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya untuk memproyeksi target pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan nilai tambah bruto (PDRB) suatu sector dari data periode 2014-2018 untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi periode 2019-2023 peneliti menggunakan metode Trend Linear. Kebutuhan investasi di 9 sektor terutama di sektor pertanian diproyeksikan mengalami kenaikan. Untuk sektor Basis lainnya juga diproyeksikan mengalami kenaikan dalam investasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai LQ pada tahun 2014 yang terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi dan Jasa lainnya tergolong tinggi. Dapat diketahui bahwa nilai LQ pada tahun 2016 yang terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi dan jasa-jasa termasuk jasa perusahaan tergolong tinggi. Dapat diketahui bahwa nilai LQ pada tahun 2017 yang terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Keuangan dan Real Estate dan jasa-jasa termasuk jasa perusahaan tergolong tinggi. Dapat diketahui bahwa nilai LQ pada tahun 2018 yang terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Keuangan dan Real Estate dan jasa-jasa termasuk jasa perusahaan tergolong tinggi. Berdasarkan perhitungan ICOR Provinsi Jawa Tengah menggunakan data investasi dan PDRB pada tahun 2014-2018, untuk ICOR tanpa tenggat waktu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai ICOR pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Koefisien ICOR pada sektor Pertambangan dan Penggalian di tahun 2014 sebesar 0,054, kemudian mengalami penurunan di tahun 2015. Sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2014-2018 mengalami fluktuasi. Sektor yang membutuhkan investasi terbesar di Jawa Tengah terjadi pada sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih. Fluktuasi ICOR yang terjadi cenderung mengalami peningkatan. Sektor konstruksi di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2014-2018 menghasilkan koefisien ICOR yang tidak begitu tinggi. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan geliat investasi yan terus meningkat meski sempat mengalami fluktuasi. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2014-2018 mengalami fluktuasi. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di Jawa Tengah pada periode 2014-2018 mengalami fluktuasi. Sektor Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah di Provinsi Jawa Tengah sempat mengalami peningkatan nilai ICOR yang signifikan hingga akhirnya mengalami penurunan. Berdasarkan perhitungan ICOR Provinsi Jawa Tengah menggunakan data investasi dan PDRB pada tahun 2014-2018, untuk ICOR tanpa tenggat waktu, diketahui bahwa sektor yang mempunyai koefisien ICOR paling kecil dilihat dari nilai rata-ratanya adalah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Sektor berikutnya yang kegiatan investasinya juga efisien adalah sektor Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

Kata kunci: Kebijakan Investasi, Location Quotient, Icor Dan Trend Linear

PENDAHULUAN

Negara-negara yang tergabung dalam integrasi ekonomi ASEAN telah menyepakati untuk diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA sejak akhir tahun 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA membawa dampak positif sekaligus negatif yang dirasakan oleh seluruh negara anggota yang terlibat. Dampak positifnya adalah semakin lancarnya arus ekspor-impor barang dan jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal karena hambatan-hambatan perdagangan internasional yang ada lebih diringankan bahkan dihilangkan. Kondisi tersebut merupakan suatu peluang sekaligus ancaman. MEA memberikan peluang menjanjikan jika negara yang terlibat memiliki tenaga kerja, modal, teknologi, produk yang unggul dan mampu bersaing dalam pasar global. Di sisi lain MEA menjadi ancaman bagi negara anggotanya yang belum siap menghadapi gempuran dan persaingan pasar yang lebih bebas.

Negara anggota MEA pun terus memantapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean ini dengan beragam upaya peningkatan mutu produk, sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan tingkat investasi. Indonesia sebagai negara agraris-industrialis dengan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah tenaga kerja yang banyak diharapkan mampu

bersaing dan mendapatkan keuntungan dari hadirnya MEA ini. Untuk mewujudkan SDA dan SDM yang berkualitas dibutuhkan modal dan keterampilan, sehingga jika pengelolaan SDA dan SDM ini berjalan dengan baik dan berkualitas maka akan menarik untuk dijadikan sasaran investasi. Mengingat dengan tumbuhnya investasi yang baik akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Tengah pada khususnya, berlakunya integrasi ekonomi MEA diharapkan menguntungkan di bidang investasi pun diharapkan akan menguntungkan negara Indonesia. Hal ini terjadi karena salah satu kesepakatan yang tertuang dalam integrasi ekonomi MEA pun membahas mengenai kemudahan arus investasi yang akan dijalankan di negara-negara anggota MEA. Oleh karena itu, Jawa Tengah harus mampu mengenali potensi yang dimiliki agar arus investasi yang masuk meningkat dan terus berkembang.

Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada kuartal I/2019 sebesar 5,14%. Pertumbuhan tersebut lebih rendah 0,23 poin dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2018 sebesar 5,37%. Akan tetapi terdapat beberapa sektor menurut lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan

pada periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan pada kondisi tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Investasi pada Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Regional Jawa Tengah.

LANDASAN TEORI

Setiap daerah memiliki beragam potensi alam, sumber daya manusia, dan budaya yang bisa menunjang perekonomian daerah jika diolah dengan baik. Mengolah potensi daerah bisa dilakukan dengan menciptakan produk unggulan baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun mengambilnya dari daerah lain. Jika dikaitkan dengan ekonomi, hal ini bisa dikaitkan dengan teori ekonomi basis dan non basis.

Teori basis ekonomi menurut Arsyad dalam Pantow, Sutomo, dan Patrick (2015) merupakan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian di ekspor sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi tersebut memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor

yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Untuk menganalisis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim adalah (*Location Quotient*) disingkat *LQ*. Pada *LQ* dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan. Dalam teknik *LQ* berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sementara ekonomi basis menurut Glasson dalam Bafadal (2014:152) menyatakan bahwa sektor atau kegiatan basis adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor atau kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kapasitas pasar sektor non basis bersifat belum berkembang atau bersifat lokal.

Melihat dari Pemerintah daerah Jawa Tengah dalam mengelola perekonomian makro regional seperti yang

ditargetkan, harus melakukan perencanaan ekonomi makro regional secara baik dan benar, agar alokasi sumber daya yang terbatas (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan manusia) menjadi efisien. Namun perlu diketahui bahwa suatu perekonomian terdiri dari sektor basis dan sektor non basis. Menurut teori ekonomi makro regional, sektor basis (unggulan) inilah yang memiliki potensi dikembangkan, karena akan mampu menghasilkan surplus kepada daerah dari keunggulan sumberdaya (*endowment*) yang dimiliki.

Teori pertumbuhan regional berbasis ekspor menerangkan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah adalah *basic* dalam arti bahwa pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas-aktivitas lain (*non-basic*) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut (Hoover dalam Soepono:2001). Menurut teori ini, semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor *basic*, sedangkan sektor *non-basic*, yang mencakup aktivitas-aktivitas pendukung, seperti perdagangan, jasa-jasa perseorangan, produksi untuk pasar lokal dan produksi input untuk produk-produk di sektor *basic*, melayani industri-industri di sektor *basic* maupun pekerja-pekerja

beserta keluarganya di sektor *basic* (Bendavid-Val dalam Soepono:2001).

Tujuan pembangunan ekonomi daerah menurut Suparmoko dalam Takalumpang (2018:4-5) adalah peningkatan pendapatan riil perkapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah, maka strategi pengembangan potensi yang ada akan lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi yang ada di daerah, langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.

3. Selanjutnya mengidentifikasi sumber daya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumber daya manusianya dan yang siap untuk digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
4. Dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub sektor, maka akan ditemukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
5. Akhirnya menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan, yang akan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Teori ekonomi basis mengklarifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Deliniasi wilayah dilakukan berdasarkan konsep perwilayahan yaitu konsep homogenitas, nodalitas, dan administrasi (Hendayana; 2003). Dijelaskan oleh Rusastra, dkk bahwa yang dimaksud kegiatan basis merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor keluar dari lingkungan

masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional, dan internasional (Hendayana; 2003). Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis sangat menentukan dalam pertumbuhan basis suatu wilayah. Sedangkan kegiatan nonbasis merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Konsep swasembada, mandiri, kesejahteraan, dan kualitas hidup sangat menentukan dalam kegiatan non basis ini. (Hakim & Subanti : 2009).

Sektor basis mengutip dari Sjafrizal dalam Cahyang (2017 : 105) adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keunggulan kompetitif yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis.

Peran Pemerintah Mendukung Sektor Unggulan Daerah

Arsyad berpendapat, ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu, Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator, Stimulator. Dengan perannya sebagai *entrepreneur*, Pemerintah daerah ber-tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis dengan cara pengembangan suatu usaha sendiri

(BUMD). Perannya sebagai *koordinator*, Pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi. Perannya sebagai *Fasilitator*, Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan(perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Perannya sebagai *Stimulator* Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur- brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan *outlets* untuk produk-produk industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan pameran. (Lincolin Arsyad dalam Chandra dan Amiruddin)

Dengan beragam potensi unggulan yang dimiliki daerah maupun yang belum dianggap unggul, ada peluang untuk mengembangkan potensi non-basis menjadi potensi basis. Hal ini membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dan

investor yang terlibat langsung dalam pembangunan perekonomian daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif ekonomi makro regional yang berbasis angka-angka. Sedangkan sifat penelitiannya adalah verifikatif-kuantitatif, yaitu menggunakan formula-formula ekonomi regional terhadap data makro di regional Jawa Tengah yang bersumber pada dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah Jawa Tengah. Dengan demikian tidak dikenal istilah populasi dan pengambilan sampel seperti halnya penelitian-penelitian bersifat mikro yang bertumpu pada data primer tingkat lapang.

Sumber, Jenis, dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data sekunder bersifat makro di regional Jawa Tengah, yang bersumber dari beberapa instansi pemerintah, antara lain: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Jakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Dinas-Dinas Teknis Lingkup Pemkab atau Pemprov Jawa Tengah dan lain-lain. (kalo di Made Antara sih Pemkab Bali bu)

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersifat makro, antara lain: Produk Domestik Bruto Indonesia secara *time series*, Produk Domestik regional Bruto Provinsi Jawa Tengah secara *time series*, target-target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, ICOR pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah, dll.

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode studi dokumentasi yakni mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan tahunan yang tersebar di berbagai instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Metode Analisis

Location Quotient (LQ)

Metode *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan sektor basis atau sektor unggulan dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah, mengacu pada formula Hoover (1975: 147), Azis (1994: 154); Bendavid-Val (1991). Prinsip metode analisis ini adalah membandingkan persentase sumbangan masing-masing sektor dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan persentase sumbangan sektor yang sama pada PNB Indonesia. Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

Dimana :

$LQ = Location Quotient$

vi = Nilai tambah sektor i di Provinsi Jawa Tengah

vt = Nilai tambah total di Provinsi Jawa Tengah

Vi = Nilai tambah sektor i nasional

Vt = Nilai tambah total nasional

Kriterianya adalah :

Jika $LQ > 1$ menunjukkan sektor ke- i di Provinsi Jawa Tengah tergolong sektor basis, atau sektor i di Provinsi Jawa Tengah lebih spesialis dari pada sektor yang sama di Indonesia.

Jika $LQ < 1$ menunjukkan sektor ke- i di Provinsi Jawa Tengah tergolong sektor non basis, atau sektor i di Provinsi Jawa Tengah kurang spesialis dari pada sektor yang sama di Indonesia.

Jika $LQ = 1$ menunjukkan keswasembadaan (self-sufficiency) sektor i di Provinsi Jawa Tengah, atau sektor i di Provinsi Jawa Tengah memiliki spesialis yang sama dengan sektor yang sama di Indonesia.

Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)

Metode *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) digunakan menentukan kebutuhan tambahan kapital atau investasi sektor-sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Formula yang digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan

investasi, mengacu pada Kadariah (1981: 27) dan Arsyad (1999: 233-251), yaitu:

$$ICOR = \frac{\Delta K_t}{\Delta Y_t}$$

$$\Delta K_t = I_t = ICOR \times \Delta Y_t$$

$$\Delta Y_t = g_t \times Y_{t-1}$$

$$g_t = \Delta Y_t / Y_{t-1}$$

$$\text{jadi } \Delta K_t = I_t = ICOR \times g_t \times Y_{t-1}$$

di mana:

ICOR = Rasio penambahan modal dan output (*Incremental Capital Output Ratio*, ICOR) (umumnya ICOR sektor pertanian 3, sektor industri 5 dan sektor jasa 5)

$\Delta K_t = I_t$ = Tambahan kapital/modal untuk investasi sektor ke-i tahun ke-t,

ΔY_t = Tambahan nilai tambah atau output atau PDRB sektor ke-i tahun ke-t akibat adanya pertumbuhan ekonomi tahun ke-t,

Y_{t-1} = nilai tambah bruto atau output atau PDRB sektor ke-i tahun ke-t-1,

g_t = Pertumbuhan sektor ke-i tahun ke-t atau target pertumbuhan sektor ke-i tahun ke-t.

Trend Linear

Proyeksi target pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan proyeksi nilai tambah bruto (PDRB) suatu sektor periode 2014-2018 sebagai jangka waktu perencanaan menggunakan metode Trend Linear, dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e \quad n \sum XY - \sum X \sum Y$$

$$b = \frac{n \sum X^2 - (\sum X)^2}{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}$$

--

$$a = Y - bX$$

di mana:

Y = pertumbuhan ekonomi periode 2014-2018

X = tahun 1997-2001

a = intersep

b = koefisien regresi atau pengaruh variabel X terhadap Y

e = error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil perhitungan LQ

Konsep LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah. *Location Quotient* merupakan rasio antara PDRB sektor tertentu terhadap total nilai PDRB disuatu daerah dibandingkan dengan sektor yang sama ditingkat perekonomian yang lebih tinggi.

a. Perhitungan LQ tahun 2014

Dapat diketahui bahwa nilai LQ pada tahun 2014 yang terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi dan Jasa lainnya tergolong

tinggi karena lebih dari 1 (satu). Tetapi, pada sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih, Perdagangan, Hotel, dan Restoran, Pengangkutan dan komunikasi, Keuangan dan Real Estate, dan Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan dan Jasa-jasa tergolong rendah karena kurang dari 1 (satu). Nilai LQ tertinggi pada tahun 2014 berada pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sedangkan nilai terendah berada pada sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih. Nilai $LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha tersebut termasuk pada sektor basis di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014, sedangkan nilai $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha tersebut termasuk pada sektor non basis di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014.

b. Perhitungan LQ tahun 2015

Dapat diketahui bahwa nilai LQ pada tahun 2015 yang terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah dan Jasa lainnya tergolong tinggi karena lebih dari 1 (satu). Tetapi, pada sektor lainnya tergolong rendah

karena kurang dari 1 (satu). Nilai LQ tertinggi pada tahun 2015 berada pada sektor Industri Pengelolaan sedangkan nilai terendah berada pada sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih. Nilai $LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha tersebut termasuk pada sektor basis di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015, sedangkan nilai $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha tersebut termasuk pada sektor non basis di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015.

c. Perhitungan LQ tahun 2016

Dapat diketahui bahwa nilai LQ pada tahun 2016 yang terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi dan jasa-jasa termasuk jasa perusahaan tergolong tinggi karena lebih dari 1 (satu). Tetapi, pada sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih, Perdagangan, Hotel, dan Restoran, Pengangkutan dan komunikasi, Keuangan dan Real Estate, dan Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan dan Jasa lainnya tergolong rendah karena kurang dari 1 (satu). Nilai LQ tertinggi pada tahun 2016 berada pada sektor Industri Pengelolaan, sedangkan nilai terendah berada pada sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih. Nilai $LQ > 1$ menunjukkan bahwa

sektor lapangan usaha tersebut termasuk pada sektor basis di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016, sedangkan nilai $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha tersebut termasuk pada sektor non basis di provinsi Jawa tengah pada tahun 2016.

d. Perhitungan LQ tahun 2017

Dapat diketahui bahwa nilai LQ pada tahun 2017 yang terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Keuangan dan Real Estate dan jasa-jasa termasuk jasa perusahaan tergolong tinggi karena lebih dari 1 (satu). Tetapi, pada sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih, Perdagangan, Hotel, dan Restoran, Pengangkutan dan komunikasi, dan Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan dan Jasa lainnya tergolong rendah karena kurang dari 1 (satu). Nilai LQ tertinggi pada tahun 2017 berada pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sedangkan nilai terendah berada pada sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih. Nilai $LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha tersebut termasuk pada sektor basis di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, sedangkan nilai $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha tersebut

termasuk pada sektor non basis di provinsi Jawa tengah pada tahun 2017.

e. Perhitungan LQ tahun 2018

Dapat diketahui bahwa nilai LQ pada tahun 2018 yang terdapat pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Keuangan dan Real Estate dan jasa-jasa termasuk jasa perusahaan tergolong tinggi karena lebih dari 1 (satu). Tetapi, pada sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih, Perdagangan, Hotel, dan Restoran, Pengangkutan dan komunikasi, dan Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan dan Jasa lainnya tergolong rendah karena kurang dari 1 (satu). Nilai LQ tertinggi pada tahun 2018 berada pada sektor Industri Pengolahan, sedangkan nilai terendah berada pada sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih. Nilai $LQ > 1$ menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha tersebut termasuk pada sektor basis di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018, sedangkan nilai $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha tersebut termasuk pada sektor non basis di provinsi Jawa tengah pada tahun 2018.

2. ICOR

a. **Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis di Regional Jawa Tengah**

1) **Determinan Kebutuhan Investasi Sektor Ekonomi**

Dalam perhitungan kebutuhan investasi sektor basis dan non basis, terdapat 3 determinan utama yang menentukan besar-kecilnya kebutuhan investasi atau tambahan modal setiap tahun, yaitu: (1) rasio tambahan kapital dan output (*Incremental Capital Output Ratio*, ICOR) suatu sektor, (2) target pertumbuhan sektor yang direncanakan tahun ke-t (gt), dan (3) nilai tambah bruto (PDRB) sektor sebelum tahun ke-t (Y_{t-1}).

Realitanya, tidak semua investasi tahun ke-t menghasilkan output (nilai tambah bruto) pada tahun ke-t, karena ada beberapa sifat investasi yang membutuhkan tenggang waktu (*time lag*) mulai awal investasi sampai mampu memproduksi. Misal, investasi bidang perkebunan. Namun untuk memudahkan dan menyederhanakan perhitungan kebutuhan investasi atau tambahan modal tahun ke-t ($\Delta K_t = I_t$), maka formula: $ICOR = \Delta K_t / \Delta Y_t$, mengasumsikan bahwa sebagian besar investasi tahun ke-t tersebut mampu menghasilkan tambahan nilai tambah bruto pada tahun ke-t (ΔY_t) juga, atau dengan kata lain tambahan nilai tambah bruto tahun ke-t (ΔY_t) dihasilkan sebagian besar oleh investasi tahun ke-t

($\Delta K_t = I_t$) dan sebagian kecil mungkin dihasilkan oleh investasi tahun-tahun sebelumnya ($\Delta K_{t-n} = I_{t-n}$).

Sedangkan pembagian tambahan nilai tambah bruto tahun ke-t (ΔY_t) oleh nilai tambah bruto sebelum tahun ke-t (Y_{t-1}) akan diperoleh pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan sektor tahun ke-t (gt). Jadi berdasarkan formula ICOR, secara sederhana dapatlah dipandang ada korelasi positif antara kebutuhan investasi tahun ke-t (I_t) dengan pertumbuhan ekonomi tahun ke-t (gt) atau tambahan nilai tambah bruto yang dihasilkan sebelum tahun ke-t (ΔY_{t-1}).

2) **Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis: Skenario-1**

Realitanya, tidak semua investasi tahun ke-t menghasilkan output (nilai tambah bruto) pada tahun ke-t, karena ada beberapa sifat investasi yang membutuhkan tenggang waktu (*time lag*) mulai awal investasi sampai mampu memproduksi. Misal, investasi bidang perkebunan. Namun untuk memudahkan dan menyederhanakan perhitungan kebutuhan investasi atau tambahan modal tahun ke-t ($\Delta K_t = I_t$), maka formula: $ICOR = \Delta K_t / \Delta Y_t$, mengasumsikan bahwa sebagian besar investasi tahun ke-t tersebut mampu menghasilkan tambahan nilai tambah bruto pada tahun ke-t (ΔY_t) juga, atau dengan kata lain tambahan nilai tambah bruto tahun ke-t (ΔY_t) dihasilkan sebagian besar oleh investasi tahun ke-t ($\Delta K_t = I_t$) dan sebagian kecil mungkin

dihasilkan oleh investasi tahun-tahun sebelumnya ($\Delta K_{t-n} = I_{t-n}$).

Sedangkan pembagian tambahan nilai tambah bruto tahun ke-t (ΔY_t) oleh nilai tambah bruto sebelum tahun ke-t (Y_{t-1}) akan diperoleh pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan sektor tahun ke-t (gt). Jadi berdasarkan formula ICOR, secara sederhana dapatlah dipandang ada korelasi positif antara kebutuhan investasi tahun ke-t (I_t) dengan pertumbuhan ekonomi tahun ke-t (gt) atau tambahan nilai tambah bruto yang dihasilkan sebelum tahun ke-t (ΔY_{t-1}).

Proyeksi nilai tambah sektor ekonomi (Y_{it}) berdasarkan *trend linear*, baik dari sektor basis maupun non basis untuk periode 2019-2023, akan diperoleh nilai tambah sektor sebelum tahun ke-t (Y_{it-1}) atau pertambahan nilai tambah setiap sektor ekonomi (ΔY_{it}) pada tahun ke-t (tabel 4 dan tabel 5 dalam lampiran).

Hasil dari perkalian ketiga determinan yang sebelumnya telah diasumsikan, maka diperoleh hasil perhitungan kebutuhan investasi dari setiap sektor basis dan non basis dalam perekonomian Jawa Tengah, seperti yang disajikan dalam lampiran tabel 6.

3) Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis: Skenario-2

1. Target pertumbuhan dari sektor-sektor ekonomi (gt) yang

direncanakan periode 2019-2023, untuk sektor basis didasarkan atas target optimistik (lebih tinggi dari pada target *trend linear* pada skenario-1), sedangkan untuk sektor non basis didasarkan atas *trend linear* (lampiran tabel 7)

2. Asumsi 2 menimbulkan implikasi pada asumsi 3 yang membedakan hasil dari skenario-1 dan skenario-2.

Asumsi 2 pada skenario-2, target pertumbuhan sektor basis sengaja dibuat lebih tinggi dengan interval teratur. Sedangkan sektor non basis mengikuti *trend linear* sama seperti skenario-1. Asumsi 2 pada skenario-2 menghasilkan proyeksi nilai tambah bruto (PDRB) sektor basis sebelum tahun ke-t pada skenario-1 (bandingkan lampiran tabel 4 dan tabel 8). Perbedaan ini akhirnya menghasilkan perhitungan kebutuhan investasi yang berbeda, dimana kebutuhan investasi sektor basis dan total investasi pada skenario-2 lebih tinggi daripada skenario-1. Dari asumsi pada skenario-2, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan, maka akan diperoleh kebutuhan investasi atau tambahan modal per tahun pada periode perencanaan

2019-2023, seperti yang disajikan pada lampiran tabel 10.

4) Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis: Skenario-2

Skenario-2 menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

$$\Delta K_t = I_t = ICOR \times g_t \times Y_{t-1}$$

(1) (2) (3)

1. ICOR sektor pertanian, industri pengolahan dan konstruksi masing-masing 1, 3 dan 5.
2. Target pertumbuhan dari sektor-sektor ekonomi (g_t) yang direncanakan periode 2019-2023, untuk sektor basis didasarkan atas target optimistik (lebih tinggi dari pada target *trend linear* pada skenario-1), sedangkan untuk sektor non basis didasarkan atas *trend linear* (lampiran tabel 7)
3. Nilai Tambah (PDRB) dari sektor ekonomi sebelum tahun ke- t (Y_{t-1}), untuk sektor basis dan non basis mengikuti asumsi dua, sehingga diperoleh hasil perhitungan pada yang disajikan pada lampiran tabel 8 dan 9.

Asumsi 2 menimbulkan implikasi pada asumsi 3 yang membedakan hasil dari skenario-1 dan skenario-2. Asumsi 2 pada skenario-2, target pertumbuhan sektor basis sengaja dibuat lebih tinggi dengan

interval teratur. Sedangkan sektor non basis mengikuti *trend linear* sama seperti skenario-1. Asumsi 2 pada skenario-2 menghasilkan proyeksi nilai tambah bruto (PDRB) sektor basis sebelum tahun ke- t pada skenario-1 (bandingkan tabel 4 dan tabel 8 dalam lampiran). Perbedaan ini akhirnya menghasilkan perhitungan kebutuhan investasi yang berbeda, dimana kebutuhan investasi sektor basis dan total investasi pada skenario-2 lebih tinggi daripada skenario-1. Dari asumsi pada skenario-2, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan, maka akan diperoleh kebutuhan investasi atau tambahan modal per tahun pada periode perencanaan 2019-2023, seperti yang disajikan pada lampiran tabel 10.

3 Kebutuhan Investasi Sektor Basis Kebutuhan Investasi Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Jika membandingkan hasil dari proyeksi antara skenario-1 dan skenario-2 tampak bahwa target pertumbuhan sektor pertanian pada skenario-2 lebih tinggi daripada skenario-1, yaitu dari nilai 5.014 (lampiran tabel 3) menjadi 5.514 (lampiran tabel 7) dengan kenaikan 500. Nilai ini akan memberikan pengaruh terhadap kebutuhan investasi dan jika investasi tersebut telah

teralisasi maka akan membawa konsekuensi berupa peningkatan nilai tambah bruto atau output sektor pertanian pada tahun ke-t+n.

Kebutuhan dana investasi ini nantinya akan menjadi pertanyaan mengenai kebutuhan dana investasi sektor basis pertanian pada tahun ke-t harus dialokasikan ke sub sektor mana, karena suatu sektor terdiri atas sub subsektor, dan ke kabupaten mana karena, wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah terbagi menjadi beberapa wilayah pemerintah kabupaten.

Dalam pengkajian ini memang tidak dilakukan pemecahan perhitungan (*Breakdown Accounting*) kebutuhan investasi sampai ke tingkat sub sektor basis dan tingkat kabupaten, dengan pertimbangan perhitungan sangat rumit dan walaupun diperoleh besaran angka sifatnya sangat relatif dan kurang fleksibel. Agar ada fleksibilitas dalam alokasi dana investasi oleh para perencana pembangunan di tingkat provinsi, maka perhitungan kebutuhan dana investasi tingkat sektor cukup memadai.

Kebutuhan Investasi Sektor Industri Pengolahan

Target pertumbuhan dari sektor industri pengolahan yang tampak pada skenario-2 lebih tinggi dari skenario-1.

Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang yang tidak bernilai menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi. Di Jawa Tengah sektor industri pengolahan merupakan sektor basis yang memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian Jawa Tengah dengan proyeksi nilai yang stabil.

Kebutuhan Investasi Sektor Konstruksi

Wilayah realisasi investasi terbesar untuk tahun 2019 masih berada di pulau Jawa, dengan lima wilayah tersebar yang paling besar dan salah satunya adalah wilayah Jawa Tengah yaitu sebesar 36,2 triliun (9,1%). Realisasi investasi tersebut masih didominasi oleh infrastruktur untuk transportasi, telekomunikasi, pembangkit listrik, dan konstruksi.

Kebutuhan investasi untuk sektor basis pada skenario-2 memiliki nilai lebih tinggi dari skenario-1, seperti yang terlihat pada tabel 6 dan 10 (lampiran). Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memperbaiki fasilitas untuk kegiatan masyarakat maupun kegiatan pemerintahan. Jadi pengembangan sektor basis konstruksi melalui investasi memiliki prospek yang cukup cerah untuk meningkatkan fasilitas umum masyarakat di Jawa Tengah. Oleh karena itu, jika dana investasi tersedia yang besarnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan setiap tahun,

maka perencanaan pembangunan di daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengarahkannya ke sektor ini.

Kebutuhan Total Investasi Perekonomian Regional Provinsi Jawa Tengah

Kebutuhan total investasi perekonomian Jawa Tengah merupakan hasil penjumlahan kebutuhan investasi semua sektor ekonomi basis dan non basis yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan antara kedua skenario, tampak bahwa kebutuhan total investasi untuk seluruh sektor, baik basis dan non basis dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah lebih besar hasil proyeksi skenario-2 dari pada skenario-1. Hal ini disebabkan pada skenario-2 target pertumbuhan sektor-sektor basis (Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Industri Pengolahan dan Kontruksi) diproyeksikan nilainya lebih tinggi dari pada skenario-1 yang hanya menggunakan proyeksi *trend linear*. Jadi jika Pemerintah Jawa Tengah menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi agar mampu menciptakan kesempatan kerja lebih banyak, maka membutuhkan investasi lebih tinggi. Sedangkan jika menginginkan pertumbuhan ekonomi sedang-sedang (moderate), maka membutuhkan investasi lebih rendah. Hasil perhitungan kebutuhan investasi yang diperoleh tampaknya realistis, baik pada skenario-1 maupun

skenario-2 jika dibandingkan dengan data historis Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (realisasi total investasi) pada PDRB Jawa Tengah.

Hasil perhitungan kebutuhan investasi yang diperoleh tampaknya realistis, baik pada skenario 1 maupun skenario-2 jika dibandingkan dengan data historis Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (realisasi total investasi) pada PDRB Jawa Tengah dari sisi penggunaan periode tahun 2014-2018 menurut harga konstan tahun 2010 berturut-turut sebesar Rp 20.191.333 juta (2014), Rp 27.141.949 juta (2015), Rp 37.876.003 (2016), Rp 52.008.946 juta (2017), dan Rp 62.377.359 juta (2018).

Kebutuhan investasi 2019-203 seperti telah disinggung sebelumnya lebih rendah dari pada realisasi investasi tahun 2014, dan cenderung meningkat secara perlahan, yaitu sebesar Rp -Rp4.964.544,93 juta (2019) dalam hal ini menghasilkan nilai negatif karena pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013, Rp Rp7.546.615,19 juta (2020), Rp Rp20.057.775,30 juta (2021), Rp 32.568.935,41 juta (2022), dan Rp Rp45.080.095,52 juta (2023). Nilai proyeksi investasi yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2014-2018 ini menunjukkan bahwa semakin ke depan kebutuhan untuk investasi tidak sebesar investasi di masa lalu (karena apa yang diinvestasikan di masa lalu dirasakan

manfaatnya di masa mendatang, sehingga kebutuhan investasinya tidak besar)

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sembilan sektor dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah, hanya tiga sektor yang teridentifikasi sebagai sektor basis yang ditunjukkan oleh nilai LQ (rata-rata 5 tahun >1 , yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (LQ = 4,86), sektor industri pengolahan (LQ = 7,51), sektor konstruksi (LQ = 4.7). Sedangkan enam sektor adalah sektor non basis yang ditunjukkan oleh LQ <1 , yaitu sektor pertambangan dan penggalian (LQ = 0,26), sektor industri pengadaan, gas listrik dan air bersih (LQ = 0,1), sektor perdagangan, hotel dan restoran (LQ = 0,94 periode satu tahun), sektor pengangkutan dan komunikasi (LQ = 0.87 periode satu tahun), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (LQ = 0,25), sektor jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah (LQ = 0,94).
2. Berdasarkan ICOR, target pertumbuhan dan nilai tambah brut (PDRB) sektor-sektor basis sebelum tahun ke-t (Y_{t-1}),

maka dapat diperkirakan kebutuhan investasi masing-masing sektor basis dan kebutuhan total investasi untuk perekonomian Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Skenario-1:

1. Kebutuhan investasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan periode 2019-2023 berturut-turut Rp57.883,13 juta (2019), Rp87.907,31 juta (2020), Rp233.697,74 juta (2021), Rp379.488,18 juta (2022), Rp525.278,61 juta (2023), atau kebutuhan total investasi selama lima tahun Rp1.168.489 juta.
2. Kebutuhan investasi sektor industri pengolahan periode 2019-2023 berturut-turut Rp1.850.214,14 juta (2019), Rp2.821.036,57 juta (2020), Rp7.492.287,27 juta (2021), Rp12.163.537,97 juta (2022), Rp16.834.788,68 juta (2023), atau kebutuhan total investasi selama lima tahun Rp37.461.436 juta.
3. Kebutuhan investasi sektor konstruksi periode 2019-2023 berturut-turut Rp284.175,71 juta (2019), Rp429.986,75

- juta (2020), Rp1.144.149,20
juta (2021), Rp1.858.311,65
juta (2022), Rp2.572.474,10
juta (2023), atau kebutuhan
total investasi selama lima
tahun Rp5.720.746 juta.
4. Kebutuhan investasi total
tiga sektor basis periode
2019-2023 berturut-turut
Rp2.192.272,97 juta (2019),
Rp3.338.930,62 juta (2020),
Rp8.870.134,21 juta (2021),
Rp14.401.337,80 juta
(2022), Rp19.932.541,39
juta (2023), atau total
kebutuhan investasi selama
lima tahun Rp44.350.671
juta.
5. Kebutuhan total investasi
untuk perekonomian Jawa
Tengah periode 2019-2023
berturut-turut
Rp4.964.544,93 juta (2019),
Rp7.546.615,19 juta (2020),
Rp20.057.775,30 juta
(2021), Rp32.568.935,41
juta (2022),
Rp45.080.095,52 juta
(2023), atau kebutuhan total
investasi selama lima tahun
Rp100.288.876,49 juta.
Kebutuhan investasi nominal
ini untuk mendukung
tercapainya pertumbuhan
- ekonomi berturut-turut
sebesar sebesar 12.41%,
(2019) 12.35% (2020),
12.36% (2021), 12.37%
(2022), 12.37% (2023), atau
pencapaian nilai tambah
bruto (PDRB) berturut-turut
sebesar Rp464.837.121.200
(2019), Rp45.620.400
(2020), Rp484.791.360
(2021), Rp923.962.321
(2022), Rp1.363.133.282
(2023).
- b. Skenario-2
1. Kebutuhan investasi sektor
pertanian, kehutanan dan
perikanan periode 2019-
2023 berturut-turut
942.116,87 juta (2019),
1.087.907,31 juta (2020),
1.233.697,74 juta (2021),
1.379.488,18 juta (2022),
1.525.278,61 juta (2023),
atau kebutuhan total
investasi selama lima tahun
2.168.488,72 juta.
2. Kebutuhan investasi sektor
industri pengolahan periode
2019-2023 berturut-turut
850.214,14 juta (2019),
3.821.036,57 juta (2020),
8.492.287,27 juta (2021),
13.163.537,97 juta,
17.834.788,68 juta, atau

- kebutuhan total investasi selama lima tahun 38.461.436,35 juta.
3. Kebutuhan investasi sektor kontruksi periode 2019-2023 berturut-turut 715.824,29 juta (2019), Rp429.986,75 juta (2020), 2.144.149,20 juta (2021), 2.858.311,65 juta (2022), 3.572.474,10 juta (2023), atau kebutuhan total investasi selama lima tahun 6.720.745,99 juta.
4. Kebutuhan investasi total tiga sektor basis periode 2019-2023 berturut-turut 807.727,03 juta (2019), 6.338.930,62 juta (2020), 11.870.134,21 juta (2021), 17.401.337,80 juta (2022), 22.932.541,39 juta (2023), atau total kebutuhan investasi selama lima tahun 47.350.671,06 juta.
5. Kebutuhan total investasi untuk perekonomian Jawa Tengah periode 2019-2023 berturut-turut 1.964.544,93 juta (2019), 10.546.615,19 juta (2020), 23.057.775,30 juta (2021), 35.568.935,41 juta (2022), 48.080.095,52 juta (2023), atau kebutuhan total investasi selama lima tahun 103.288.876,49 juta. Kebutuhan investasi nominal ini untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi berturut-turut sebesar sebesar 12.41%, (2019) 12.35% (2020), 12.37% (2021), 12.38% (2022), 12.38% (2023), atau pencapaian nilai tambah bruto (PDRB) berturut-turut sebesar Rp465.011.086.281 (2019), Rp219.585.480 (2020), Rp219.585.480 (2021), Rp219.585.480 (2022), Rp219.585.480 (2023).

5.2 Rekomendasi Kebijakan

1. Dalam rangka perencanaan makro regional Provinsi Jawa Tengah, sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, menerapkan prinsip-prinsip perencanaan makro secara ilmiah. Artinya perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat, metode dan peralatan analisis ilmiah, sehingga menghasilkan rencana (program dan kegiatan) yang layak diterapkan untuk

mencapai tujuan dan target-target perencanaan secara tepat.

2. Sumberdaya investasi yang semakin terbatas, baik bersumber dari pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri, agar alokasinya diprioritaskan untuk 30 pengembangan sektor-sektor basis, yaitu pertanian, perkebunan, dan kehutanan; sektor industri pengolahan, serta sektor konstruksi yang menjadi motor penggerak perekonomian Jawa Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Jawa Tengah perlu melakukan analisis sektor-sektor basis dalam perekonomian daerah masing-masing. Ini berkaitan dengan rencana alokasi sumberdaya investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke sektor-sektor basis di setiap kabupaten di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, Made. 2005. KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN REGIONAL BALI. SOCA (*SOCIO-ECONOMIC OF AGRICULTURE AND AGRIBUSINESS*). Universitas Udayana.
- Bafadal, Azhar .2014. ANALISIS SEKTOR BASIS PERTANIAN UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH. *AGRIPLUS*, Volume 24 Nomor : 02 Mei 2014.
- Cahyang, Edi. 2017. ANALISIS PENETAPAN SEKTOR BASIS DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BONE. *Jurnal Riset Edisi XIV UNIBOS Makassar Vol 3, No. 003 (2017)*.
- Chandra , Taufik & Amiruddin K. Tidak diketahui. *ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIAL DI KOTA MAKASSAR*.
- Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 10, Nomor 1, April 2009: 13 - 33 *EKONOMI REGIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA: Pendekatan Sektor Basis dan Analisis Input-Output Sri Subanti dan Arif Rahman Hakim :16)*
- Pantow, Srikandi , Sutomo Palar, dan Patrick Wauran .2015. Analisis Potensi Unggulan dan Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 Tahun 2015*.
- Soepono, Prasetyo. 2001. TEORI PERTUMBUHAN BERBASIS EKONOMI (EKSPOR) : POSISI DAN SUMBANGANNYA BAGI PERBENDAHAN-RAAN ALAT-ALAT ANALISIS REGIONAL. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indoneia Vol. 16, No. 1, 2001, 41 - 53*
- Takalumang, Vicky Y, Vekie A. Rumat, dan Agnes L. Ch. P Lopian. 2018. ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/ KEPULAUAN SANGIHE. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 01 Tahun 2018*.
- AGRIPLUS, Volume 24 Nomor : 02 Mei 2014, ISSN 0854-0128
- www.bps.go.id
- <http://bpsjateng.go.id>

https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

LAMPIRAN

Tabel 1 Hasil Perhitungan LQ

	Sektor LAPANGAN USAHA	LQ 2014	LQ 2015	LQ 2016	LQ 2017	LQ 2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.69	1.08	1.07	10.43	1.03
2	Pertambangan dan Penggalian	0.22	0.24	0.28	0.29	0.29
3	Industri Pengolahan	1.64	16.36	16.3	1.63	1.63
4	Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11
5	Konstruksi	1.04	10.29	1.04	10.41	1.04
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	0.94				
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.87				0.86
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	0.70	6.94	0.69	6.88	0.68
9	Jasa Perusahaan	0.21	2.06	0.21	0.21	0.21
10	Real Estate/ Real Estate Activities	0.13	1.37	0.14	1.43	0.14
11	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	0.25				
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.80	7.97	0.79	0.79	0.77
13	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	0.12	1.15	1.19	1.23	1.25
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.73	0.72	0.75	0.76	0.77
15	Jasa lainnya	1.00	9.45	0.95	0.95	0.95
16	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	0.94				

Tabel 2 Kriteria

	Sektor LAPANGAN USAHA	Kriteria 2014	Kriteria 2015	Kriteria 2016	Kriteria 2017	Kriteria 2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	Non Basis	Non Basis	Non Basis	Non Basis	Non Basis
3	Industri Pengolahan	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis
4	Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih	Non Basis	Non Basis	Non Basis	Non Basis	Non Basis
5	Konstruksi	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Non Basis				
7	Pengangkutan dan Komunikasi	Non Basis				Non Basis
8	Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Non Basis	Basis	Non Basis	Basis	Non Basis
9	Jasa Perusahaan	Non Basis	Basis	Non Basis	Non Basis	Non Basis
10	Real Estate/ Real Estate Activities	Non Basis	Basis	Non Basis	Basis	Non Basis
11	Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Non Basis				
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Non Basis	Basis	Non Basis	Non Basis	Non Basis
13	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	Non Basis	Basis	Basis	Basis	Basis
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Non Basis	Non Basis	Non Basis	Non Basis	Non Basis
15	Jasa lainnya	<i>Selfsufficent</i>	Basis	Non Basis	Non Basis	Non Basis
16	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	Non Basis				

Tabel 3
Proyeksi Target Pertumbuhan Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%) (Skenario-1)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,0143	4,9932	4,9984	4,9996	5,0001	5,00
2	Pertambangan dan Penggalian	45,2326	44,9448	45,0159	45,0324	45,0398	45,05
3	Industri Pengolahan	61,6248	61,6254	61,6252	61,6252	61,6252	61,63
4	Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih	12.162,3684	12.103,8727	12.118,3182	12.121,6684	12.123,1595	12.125,88
5	Konstruksi	31,5687	31,3388	31,3956	31,4087	31,4146	31,43
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	9,1259	9,0916	9,1000	9,1020	9,1029	9,10
7	Pengangkutan dan Komunikasi	69,6319	69,4420	69,4890	69,4998	69,5047	69,51
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	18,9714	18,9078	18,9235	18,9271	18,9288	18,93
9	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	10,8938	10,8488	10,8599	10,8625	10,8636	10,87
	DPRB	12.414,4318	12.355,0650	12.369,7257	12.373,1259	12.374,6391	12.377,3975

Catatan:

1. Cetak tebal = sektor basis
2. Proyeksi target pertumbuhan sektor Listrik, Gas dan Air Minum diatur sedemikian rupa walaupun pertumbuhannya cenderung menurun dari tahun 2019-2023, penurunan secara fluktuatif namun tetap positif dengan hasil nilai yang cukup besar.
3. Proyeksi target pertumbuhan sektor basis dan non basis menggunakan metode *Trend Linear*, berdasarkan data pertumbuhan sektor-sektor ekonomi deret waktu tahun 2014-2018.

Tabel 4
Proyeksi Nilai Tambah Bruto Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan, Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%)
(Skenario-1)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp121.358.497.577	Rp6.061.825	Rp64.360.128	Rp122.658.431	Rp180.956.734
2	Pertambangan dan Penggalian	Rp20.871.547.351	Rp1.016.629	Rp10.813.084	Rp20.609.538	Rp30.405.993
3	Industri Pengolahan	Rp322.173.714.462	Rp15.753.323	Rp167.355.481	Rp318.957.639	Rp470.559.797
4	Pengadaan Listrik , Gas dan Air Bersih	Rp1.531.762	Rp81.873	Rp869.760	Rp1.657.648	Rp2.445.535
5	Konstruksi	Rp89.391.917	Rp4.718.768	Rp50.163.600	Rp95.608.431	Rp141.053.262
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Rp151.989.574	Rp8.049.800	Rp85.553.947	Rp163.058.094	Rp240.562.242
7	Pengangkutan dan Komunikasi	Rp70.727.805	Rp3.610.357	Rp38.407.550	Rp73.204.742	Rp108.001.935
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Rp42.699.574	Rp2.276.363	Rp24.200.181	Rp46.123.999	Rp68.047.817
9	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	Rp77.021.178	Rp4.051.461	Rp43.067.630	Rp82.083.799	Rp121.099.969
	Total PDRB	Rp464.837.121.200	Rp45.620.400	Rp484.791.360	Rp923.962.321	Rp1.363.133.282

Catatan:

1. Proyeksi menggunakan asumsi-asumsi skenario-1
2. Cetak tebal = sektor basis

Tabel 5
Proyeksi Pertumbuhan Nilai Bruto Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010, Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)
(Skenario-1)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp121.370.041.240	-Rp11.543.663	Rp17.605.488	Rp46.754.640	Rp75.903.791	Rp105.052.943
2	Pertambangan dan Penggalian	Rp20.873.488.150	-Rp1.940.799	Rp2.957.428	Rp7.855.655	Rp12.753.883	Rp17.652.110
3	Industri Pengolahan	Rp322.203.738.340	-Rp30.023.878	Rp45.777.201	Rp121.578.280	Rp197.379.359	Rp273.180.438
4	Pengadaan Listrik , Gas dan Air Bersih	Rp1.687.798	-Rp156.036	Rp237.908	Rp631.852	Rp1.025.796	Rp1.419.739
5	Konstruksi	Rp98.393.741	-Rp9.001.824	Rp13.720.592	Rp36.443.008	Rp59.165.423	Rp81.887.839
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	Rp167.340.711	-Rp15.351.137	Rp23.400.937	Rp62.153.010	Rp100.905.084	Rp139.657.158
7	Pengangkutan dan Komunikasi	Rp77.621.925	-Rp6.894.119	Rp10.504.477	Rp27.903.073	Rp45.301.669	Rp62.700.266
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	Rp47.042.346	-Rp4.342.773	Rp6.619.136	Rp17.581.045	Rp28.542.954	Rp39.504.863
9	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	Rp84.749.490	-Rp7.728.312	Rp11.779.773	Rp31.287.857	Rp50.795.942	Rp70.304.027
	Total PDRB	Rp464.924.103.741	-Rp86.982.540	Rp132.602.940	Rp352.188.420	Rp571.773.901	Rp791.359.381

Sumber: Hasil dari perhitungan trend nilai Yt proyeksi asli

Catatan: Cetak Tebal = Sektotr Basis

Tabel 6
Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Jawa Tengah, 2019-2023 (Juta Rupiah)
(Skenario-1)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-Rp57.883,13	Rp87.907,31	Rp233.697,74	Rp379.488,18	Rp525.278,61	Rp1.168.489
2	Industri Pengolahan	- Rp1.850.214,14	Rp2.821.036, 57	Rp7.492.287,2 7	Rp12.163.537, 97	Rp16.834.788, 68	Rp37.461.43 6
3	Konstruksi	-Rp284.175,71	Rp429.986,75	Rp1.144.149,2 0	Rp1.858.311,6 5	Rp2.572.474,1 0	Rp5.720.746
	Sub total Kebutuhan Investasi Sektor Basis	- Rp2.192.272,97	Rp3.338.930, 62	Rp8.870.134,2 1	Rp14.401.337, 80	Rp19.932.541, 39	Rp44.350.67 1
4	Pertambangan dan Penggalian	-Rp87.787,45	Rp132.921,15	Rp353.629,76	Rp574.338,36	Rp795.046,97	Rp1.768.149
5	Pengadaan Listrik , Gas dan Air Bersih	- Rp1.897.761,71	Rp2.879.610,5 5	Rp7.656.982,82	Rp12.434.355,0 8	Rp17.211.727,3 4	Rp38.284.91 4
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	-Rp140.092,67	Rp212.751,30	Rp565.595,27	Rp918.439,23	Rp1.271.283,20	Rp2.827.976
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-Rp480.050,67	Rp729.452,37	Rp1.938.955,41	Rp3.148.458,46	Rp4.357.961,50	Rp9.694.777
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-Rp82.388,56	Rp125.153,11	Rp332.694,78	Rp540.236,44	Rp747.778,11	Rp1.663.474
9	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	-Rp84.190,89	Rp127.796,08	Rp339.783,06	Rp551.770,03	Rp763.757,00	Rp1.698.915
	Sub total Kebutuhan Investasi Sektor Non Basis	- Rp2.772.271,96	Rp4.207.684, 57	Rp11.187.641, 09	Rp18.167.597, 61	Rp25.147.554, 13	Rp55.938.20 5

Catatan: Sebagai perbandingan, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Investasi) di Provinsi Jawa Tengah
No 1-3 sektor basis
No 4-9 sektor non basis

Tabel 7
Proyeksi Target Pertumbuhan Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%) (Skenario-2)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,514	5,493	5,498	6,000	6,500	5,801
2	Pertambangan dan Penggalian	45,233	44,945	45,016	45,032	45,040	45,053
3	Industri Pengolahan	62,125	62,625	63,125	63,625	64,125	63,125
4	Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih	12.162,368	12.103,873	12.118,318	12.121,668	12.123,159	12.125,877
5	Konstruksi	32,069	32,569	33,069	33,569	34,069	33,069
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	9,126	9,092	9,100	9,102	9,103	9,104
7	Pengangkutan dan Komunikasi	69,632	69,442	69,489	69,500	69,505	69,513
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	18,971	18,908	18,923	18,927	18,929	18,932
9	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	10,894	10,849	10,860	10,862	10,864	10,866
	Total Icor	12.415,932	12.357,795	12.373,399	12.378,286	12.381,293	12.381,341

1. Cetak tebal = Sektor Basis
2. Proyeksi pertumbuhan sektor Listrik, Gas dan Air Minum diatur sedemikian rupa walau pertumbuhannya cenderung menurun dari tahun 2019-2023, penurunan secara fluktuatif, namun tetap positif dengan hasil nilai yang cukup besar.
3. Pertumbuhan sektor basis didasarkan atas target optimistik (lebih tinggi dari pada target *Trend Linear*), sedangkan sektor non basis didasarkan atas metode *Trend Linear* menggunakan basis data deret waktu tahun 2014-2018.

Tabel 8
Proyeksi Nilai Tambah Bruto Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstanta 2010, Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah) (Skenario-2)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-Rp12.543.663	Rp18.605.488	Rp47.754.640	Rp76.903.791	Rp106.052.943
2	Pertambangan dan Penggalian	-Rp1.940.799	Rp2.957.428	Rp7.855.655	Rp12.753.883	Rp17.652.110
3	Industri Pengolahan	-Rp29.023.878	Rp46.777.201	Rp122.578.280	Rp198.379.359	Rp274.180.438
4	Pengadaan Listrik , Gas dan Air Bersih	-Rp156.036	Rp237.908	Rp631.852	Rp1.025.796	Rp1.419.739
5	Konstruksi	-Rp8.001.824	Rp14.720.592	Rp37.443.008	Rp60.165.423	Rp82.887.839
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	-Rp15.351.137	Rp23.400.937	Rp62.153.010	Rp100.905.084	Rp139.657.158
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-Rp6.894.119	Rp10.504.477	Rp27.903.073	Rp45.301.669	Rp62.700.266
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-Rp4.342.773	Rp6.619.136	Rp17.581.045	Rp28.542.954	Rp39.504.863
9	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	-Rp7.728.312	Rp11.779.773	Rp31.287.857	Rp50.795.942	Rp70.304.027
	Total PDRB	-Rp86.982.540	Rp132.602.940	Rp352.188.420	Rp571.773.901	Rp791.359.381

Catatan:

1. Proyeksi menggunakan asumsi-asumsi skenario-2, dengan asumsi nilai tambah bruto sektor basis mengalami kenaikan yang teratur.
2. Cetak tebal = sektor basis

Tabel 9
Proyeksi Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)
(Skenario-2)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-Rp121.382.584.903	Rp31.149.151	Rp29.149.151	Rp29.149.151	Rp29.149.151
2	Pertambangan dan Penggalian	-Rp20.875.428.949	Rp4.898.227	Rp4.898.227	Rp4.898.227	Rp4.898.227
3	Industri Pengolahan	-Rp322.232.762.218	Rp75.801.079	Rp75.801.079	Rp75.801.079	Rp75.801.079
4	Pengadaan Listrik , Gas dan Air Bersih	-Rp1.843.833	Rp393.944	Rp393.944	Rp393.944	Rp393.944
5	Konstruksi	-Rp106.395.565	Rp22.722.416	Rp22.722.416	Rp22.722.416	Rp22.722.416
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	-Rp182.691.848	Rp38.752.074	Rp38.752.074	Rp38.752.074	Rp38.752.074
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-Rp84.516.044	Rp17.398.596	Rp17.398.596	Rp17.398.596	Rp17.398.596
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-Rp51.385.119	Rp10.961.909	Rp10.961.909	Rp10.961.909	Rp10.961.909
9	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	-Rp92.477.801	Rp19.508.085	Rp19.508.085	Rp19.508.085	Rp19.508.085
	Total PDRB	-Rp465.011.086.281	Rp219.585.480	Rp219.585.480	Rp219.585.480	Rp219.585.480

Sumber: Diolah dari tabel 3.8

Catatan:

1. Cetak tebal = sektor basis
2. Proyeksi nilai tambah skenario-2 untuk 2019-2023 menggunakan metode time series, sehingga nilai pertumbuhannya setiap tahun sama untuk semua sektor.

Tabel 10
Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, 2019-2023 (Juta Rupiah)
(Skenario-2)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	942.116,87	1.087.907,31	1.233.697,74	1.379.488,18	1.525.278,61	2.168.488,72
2	Industri Pengolahan	- 850.214,14	3.821.036,57	8.492.287,27	13.163.537,97	17.834.788,68	38.461.436,35
3	Konstruksi	715.824,29	1.429.986,75	2.144.149,20	2.858.311,65	3.572.474,10	6.720.745,99
	Sub total Kebutuhan Investasi Sektor Basis	807.727,03	6.338.930,62	11.870.134,21	17.401.337,80	22.932.541,39	47.350.671,06
4	Pertambangan dan Penggalian	- 87.787,45	132.921,15	353.629,76	574.338,36	795.046,97	1.768.148,79
5	Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih	- 1.897.761,71	2.879.610,55	7.656.982,82	12.434.355,08	17.211.727,34	38.284.914,08
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	- 140.092,67	212.751,30	565.595,27	918.439,23	1.271.283,20	2.827.976,33
7	Pengangkutan dan Komunikasi	- 480.050,67	729.452,37	1.938.955,41	3.148.458,46	4.357.961,50	9.694.777,07
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	- 82.388,56	125.153,11	332.694,78	540.236,44	747.778,11	1.663.473,88
9	Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah	- 84.190,89	127.796,08	339.783,06	551.770,03	763.757,00	1.698.915,28
	Sub total Kebutuhan Investasi Sektor Non Basis	- 2.772.271,96	4.207.684,57	11.187.641,09	18.167.597,61	25.147.554,13	55.938.205,44

Catatan: Sebagai perbandingan, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Investasi) di Provinsi Jawa Tengah, kebutuhan investasi diasumsikan mengalami kenaikan yang sama atau konstan.

No 1-3 adalah sektor basis

No 4-9 adalah sektor non basis